

**UPAYA PERDAMAIAN/HEPING DI ERA PEMERINTAHAN KOLABORATION DI
REPUBLIK OF CHINA-NANJING (1940-1945) DENGAN PEMERINTAH
PENDUDUKAN JEPANG**

Agung Wibiyanto, Markus Utomo Sukendar
Politeknik Indonusa Surakarta

e-mail: agungadrianus@gmail.com, markus.utomo@poltekindonusa.ac.id

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk mengulas beberapa usaha dari Wang Jing Wei untuk mendirikan pemerintahan kolaborasi dengan pendudukan Jepang di China dengan dalil untuk menyelamatkan China dari kehancuran total di masa Perang Sino-Jepang II (1937-1945) dan juga mengembalikan kedaulatan Republik Cina yang terkoyak koyak sejak masa warlordism. Untuk itu, kami akan menganalisa Wang dengan konsep revolusi. Wang melanjutkan kebijakan awal Sun Yat Sen dan sayap kiri Kuomintang sebelum perang”. Maksudnya dengan upaya perdamaian dapat menghidarkan diri khususnya Cina dari kehancuran total. Upaya perdamaian/Heping yang diajarkan oleh Sun Yat Sen ternyata disalahartikan untuk kepentingan politis oleh kelompok kelompok sosial tertentu di China seperti halnya Wang Jing Wei untuk merebut tampuk kekuasaan tertinggi di dalam Kuomintang/partai nasionalis China. Upaya perdamaian dengan membentuk pemerintahan kolaborasi dengan pendudukan Jepang merupakan bentuk strategi politis bagi kelompok Wang Jing Wei untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Cina berjuang bersama pemerintah pendudukan Jepang dan memberikan gambaran bahwa pemerintah pendudukan Jepang bersama pemerintah kolaborasi republik of China-Nanjing hampir sama seperti bangsa Manchu dan Mongol di saat memerintah daratan Cina yang juga mendudukkan bangsa Han di pemerintahan dalam mencapai kemakmuran bersama.

Kata kunci: *Heping/upaya perdamaian, Pemerintahan Republik China, Wang Jing Wei, Pendudukan Jepang*

**TITLE SHOULD BE CONDENSE, DESCRIBING THE CONTENT AND NOT MORE
THAN THIRTEEN WORDS**

Author
Affiliation (your institution)
e-mail: author@email.ac.id

Abstract- This study aims to analyse Wang Jing Wei's collaborative government with the Japanese occupation to save China from total destruction during the Second China-Japanese War (1937-1945) as well as to restore the sovereignty of the Republic of China from civil wars. For that purpose, we will analyse this collaborative government in the view of theory of revolution. Wang continued the initial policies of Sun Yat Sen and, then, the left-wing Kuomintang. The peace effort/Heping taught by Sun Yat Sen turned out to be misinterpreted for political interests by certain social groups in China such as Wang Jing Wei to seize the highest position of power in the Kuomintang/Chinese nationalist party. The peace effort by forming a collaborative government with the Japanese occupation is a form of political strategy for Wang Jing Wei's group to gain support from the Chinese people fighting with the Japanese occupation government and provides an illustration that the Japanese occupation government and the collaborative government of the Republic of China-Nanjing are almost the same as the Manchus and The Mongols at the time ruled mainland China who also placed the Han people in government in achieving mutual prosperity.

Keywords: *Heping/peace efforts, Government of the Republic Of China Nanjing, criticism, Wang Jing Wei, Japanese Occupation*

Pendahuluan

Wang Jing Wei sering dikonotasikan sebagai pengkhianat ketika berkolaborasi dengan pemerintahan pendudukan Jepang. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, kita perlu juga melihat paradigma aktor, yakni Wang Jing Wei. Dia melihat heping dalam kerangka teori revolusi komunis agar bisa memahami peran sejarah Wang Jing Wei. Dia berusaha mendialektikakan kekuasaan yang didasari pada power dengan standar normatif budaya Cina dan sejauhmana Wang Jing Wei mendapatkan legitimasi tersebut (Rochmat, 2019: 33).

Wang Jing Wei bersifat rasional ketika militer Jepang bisa menjatuhkan pemerintahan presiden Chiang Kai Shek pada tahun 1937. Perdamaian dengan pemerintahan pendudukan Jepang dimak-sudkan untuk menghindarkan Cina dari kehancuran total dan sekaligus sebagai konsolidasi sayap kiri dalam merebut kekuasaan di Cina.

Sejarah Cina memang tidak bisa dilepaskan dari berbagai konflik panjang mulai dari revolusi petani dalam menumbangkan kekuasaan feodal kuno dan seringkali dipenuhi dengan lika liku pandangan yang beraneka ragam terlebih di urusan “pengkhianatan” (Kusmayadi, 2018). Hal ini tercermin mulai dari peristiwa pengkhianatan Qin Hui dalam menyingkirkan jenderal legendaris Yu Fei di era kekaisaran Song. Wu San Gui, jenderal legendaris di akhir masa kekaisaran Ming, meminta tolong kepada otoritas kekuasaan Manchu untuk memadamkan pemberontakan Li Shi Cheng dan revolusi petaninya yang berakibat bangsa Manchu berkuasa di daratan Cina. Pada masa modern, Wang Jing Wei berkolaborasi dengan pemerintah pendudukan Jepang di Cina sejak tahun 1940.

Tulisan ini menitikberatkan pada sosok Wang Jing Wei yang tidak asing lagi dalam sejarah Revolusi Cina yang dikumandangkan sejak 10 Oktober 1911. Perkenalannya dengan Dr Sun Yat Sen membawa dirinya masuk dalam lingkaran elite kaum revolusioner Cina yang tergabung dalam Kuomintang dalam menggulingkan kekuasaan kekaisaran Manchu dan sekaligus menjadi salah satu orang kepercayaan Dr Sun Yat Sen (Saryani, 2008). Potensi sebagai politisi ditunjukkan oleh Wang Jing Wei mampu menghantarkan dirinya duduk sebagai kepala

sayap kiri organisasi Kuomintang (Pulungsari, 2018) dalam penyatuan integrasi Cina di tahun 1928 yang mengakhiri dominasi kelompok Beiyang di Beijing.

Kelompok Beiyang merupakan kepanjangan tangan dari era pemerintahan Yuan Shih Kai, di mana terdiri dari fraksi fraksi militer yang notabene terkenal sebagai warlord dan seringkali bertikai satu dengan yang lain semenjak tahun 1916. Oleh sebab itu, ketika Yuan Shih Kai meninggal dunia, konflik antar para panglima perang berlangsung di seluruh daratan Cina. Melihat realita yang ada di saat itu, Sun Yat Sen juga telah mengakomodasi kekuatan-nya melalui Kuomintang (partai nasionalis Cina) di Canton yang didukung dengan underbow militer Kuomintang, yakni akademi militer Whampoa berusaha untuk mengalahkan para panglima perang dan menyatukan Cina kembali. Di dalam proses penyatuan Cina kembali lewat ekspedisi militer ke utara memang telah dipersiapkan oleh Sun Yat Sen sebelum beliau meninggal dunia yakni membangun aliansi dengan Uni Soviet, di mana terdapat beberapa penasehat Uni Soviet lewat komintern seperti Adolf Joffe dan timbal baliknya Pihak pemerintahan nasionalis mengirimkan misi ke Uni Soviet untuk belajar mengenai birokrasi pemerintahan (Darini, 2010). Di sisi lain, Uni Soviet telah mendirikan Biro Timur Jauh di Siberia di kota Vladivostok. Biro tersebut di bawah kendali Komintern, lalu mengirimkan agen bernama Michael Borodin. Memang diplomasi Sun Yat Sen di dunia internasional untuk mencari dukungan mengenai reunifikasi dengan komunis ditolak oleh Amerika Serikat dan Inggris (Wijaya et al., 2015).

Di dalam aliansi yang dibangun baik dari Uni Soviet dan pemerintah nasionalis Cina menyebabkan Kuomintang terbagi menjadi dua fraksi besar yakni fraksi sayap kiri dan sayap kanan. Fraksi sayap kiri yang berafiliasi dengan kaum komunis Cina yang saat itu juga berkembang, di mana Wang Jingwei berada di posisi ini. Sementara itu fraksi sayap kanan, di mana dominasi militer garis keras serta memunculkan Chiang Kai Shek sebagai kampiun di kelompok ini. Memang di dalam pejalanannya, kedua fraksi ini saling bergesekan satu sama lain di dalam memperebutkan pengaruh Kuomintang dan memuncak setelah Sun Yat Sen meninggal dunia (Wijaya et al., 2015).

Koalisi ini akhirnya pecah dan fraksi sayap kanan mengambil alih pengaruh di dalam Kuomintang mengingat kaum komunis Cina juga keluar dari koalisi dan membentuk pemerintahan tandingan di Kiangsi sehingga mulai saat itu konflik pecah dan terjadi pemburuan secara besar besaran oleh kekuatan militer Chiang Kai Shek untuk menumpas pemberontakan Komunis Cina tersebut. Beberapa hal yang telah disebutkan tersebut menyebabkan perang dingin antara Wang Jing Wei dengan Chiang Kai Shek walaupun keduanya masih duduk dalam struktur organisasi yang sama yakni Kuomintang, namun gesekan antara keduanya seringkali terjadi dan berujung pada rivalitas antara Chiang Kai Shek dengan Wang Jing Wei.

Keduanya mengklaim sebagai penerus sejati ajaran Sun Yat Sen tentang San Min Chu I dan saling berebut pengaruh dalam tubuh partai Kuomintang. Perselisihan tersebut sempat mereda setelah insiden Xian, di mana kebijakan Chiang Kai Shek mulai berubah, yang semula memprioritaskan memburu dan menghancurkan kelompok Komunis Cina, mulai berubah ketika mesin perang Jepang mulai mengancam kedaulatan republik Cina setelah mencaplok wilayah Manchuria (Xia, 2010). Prioritas yang dicapai ialah mengambil jalan perang di mana kebijakan ini didukung oleh Wang Jing Wei demi keutuhan republik Cina. Akan tetapi, hal tersebut hanya berjalan sebentar saja setelah dihadapkan dengan kenyataan kekalahan beruntun militer Cina, mulai dari Shanghai hingga jatuhnya ibu kota republik Cina di Nanjing pada akhir tahun 1937. Wang Jing Wei dan beberapa politisi lainnya tidak mengikuti jalan kebijakan Chiang

PEMBAHASAN

Wang Jing Wei sering dikonotasikan sebagai pengkhianat negara baik di RRC maupun di Taiwan. Namun di pertengahan tahun 1970, telah bermunculan beberapa hasil penelitian baik dari Timothy Brook (2007), Zanasi (2006) yang sebelumnya didasarkan pada riset John Hunter Boyle (1972). Beberapa riset tersebut menyebutkan bahwa langkah Wang Jing Wei dalam menjalin perdamaian

yang memindahkanibukota sementara ke Chungking dan tetap melanjutkan konflik militer dengan Jepang. Wang Jing Wei dan beberapa politisi lainnya akhirnya melobi pihak pemerintah pendudukan Jepang dan menawarkan beberapa bentuk perdamaian yang akhirnya disetujui oleh pihak pemerintah pendudukan Jepang. Akhirnya, pemerintah pendudukan Jepang mendudukkan Wang Jing Wei serta beberapa politisi lainnya ke dalam pemerintahan baru dengan menggunakan bendera dan atribut republik Cina yang sama, di mana pemerintahan ini sering dianggap sebagai “pemerintahan boneka” yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang di daratan Cina (Kelly Anne Hammond, 2015).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penulisan artikel ini ialah kualitatif dengan analisis deskriptif. Untuk sumber data yang digunakan ialah literatur baik berupa buku dan juga jurnal terkait dengan tokoh Wang Jing Wei serta dinamika revolusi Cina. Dari beberapa literatur yang ada tersebut dianalisis sesuai dengan kajian historis yang meliputi kritik sumber mengingat sumber sumber data yang berupa literatur dan jurnal yang ada belum bisa dikatakan obyektif di dalam menampilkan peristiwa sejarah terlebih pada sisi alasan Wang Jing Wei yang diinterpretasikan sebagai seorang pengkhianat nasionalisme Cina. Oleh sebab itu di dalam artikel ini mencoba untuk menyajikan beberapa interpretasi yang bisa dikatakan berimbang dan diharapkan mendekati sebuah obyektifitas.

dengan pemerintah pendudukan Jepang didasarkan pada aspek budaya politik, di mana perdamaian yang dicetuskan oleh Wang merupakan “kelanjutan dari kebijakan Sun Yat Sen dan sayap kiri Kuomintang sebelum perang” (Takeda, 2014). Hal ini mengandung maksud dengan upaya perdamaian yang bertujuan untuk menghindarkan Cina dari kehancuran total akibat perang Sino-Jepang II yang tidak menguntungkan bagi Cina. Baik Brook, Zanasi

dan juga Boyle memandang dari sisi orang-orang Cina yang mau berkompromi dengan pemerintah pendudukan Jepang bahwa cara perdamaian akan membantu Cina untuk merekonstruksikan dirinya dan dengan demikian dapat bertahan hidup sebagai sebuah bangsa modern di bawah situasi yang tidak menguntungkan.

Salah satu hal yang paling jarang untuk dilihat dari sisi kedaulatan dari hasil perdamaian dengan pemerintah pendudukan Jepang di daratan Cina yang diwujudkan dalam bentuk pemerintahan Republik Cina-Nanjing ialah lemahnya pemerintahan ini, di mana Wang Jing Wei sebagai presiden tidak mampu berbuat banyak terlebih ketika dihadapkan pada tuntutan dari pemerintah pendudukan Jepang khususnya pada aspek ekonomi, industri dan juga keamanan/militer. Di bawah ini akan diuraikan beberapa kritik mendasar atas beberapa pandangan dari apa yang dikemukakan oleh Wang Jing Wei, yang banyak menuai kritik di dalam merefleksikan *San Min Chu I* (Tiga Prinsip Kerakyatan).

1. Kritik Heping/ Perdamaian di Manchuria

Semenjak sepeninggal Zhang Zuo Lin sebagai warlord terkuat di Manchuria dan tersingkirnya marsekal Zhang Xueliang yang merupakan putra Zhang Zuo Lin yang dekat dengan pemerintah nasionalis Cina, pemerintah militer Jepang di tahun 1931 mulai menganeksasi Manchuria dan mendirikan pemerintahan “boneka” *Manchukuo* di bawah pimpinan kaisar Manchu terakhir, Henry Pu Yi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni perluasan kepentingan industri Jepang yang sudah terlihat ketika Zhang Zuolin masih berkuasa di Manchuria dan sedemikian mungkin menjauhkan Zhang dari kontak-kontak pengaruh nasionalisme

Cina yang saat itu telah membentuk pemerintahan yang berdaulat di Nanjing.

Han Li Sheng, yang merujuk pada pandangan Bunker (1972), menjelaskan bahwa beberapa data dan analisa yang mengupas tentang pendudukan Jepang di Manchuria memberikan penegasan yang dikatakan cukup rumit mengenai pemerintahan kolaborasi di wilayah tersebut. Salah satu contoh terobosan sesuatu hal yang menarik yakni para lokal elit memutuskan untuk bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang daripada hidup di dalam lingkungan pengasingan (Zanasi, 2008). Para elit lokal akan hidup normal dan juga aman serta kedudukan sosial mereka akan kembali jika mereka bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Walaupun demikian, para elit lokal yang ada sebelumnya saling bersaing dalam hierarki status sosial dan di zaman pendudukan Jepang tidak ada perbedaan yang mencolok. Keberhasilan ekonomi yang diraih di zaman pendudukan Jepang di wilayah Manchuria, oleh masyarakat Cina yang tinggal di wilayah tersebut kebanyakan telah menemukan kehidupan yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka tinggalkan di masa lalu, yakni di bawah pimpinan *warlord* Cina dan rekan-rekan mereka di bawah pemerintahan rezim nasionalis Chiang Kai Shek di sisi balik Tembok Besar (Lin, 2018).

Beberapa interpretasi tersebut memang hanya dilapisan masyarakat elit lokal, di mana untuk kasus Manchuria ini tergolong masyarakat yang multi-etnis dan cenderung kompleks serta tidak ideal jika hanya mengambil sampel elit lokal. Beberapa elit lokal seperti Chang Ching-hui, Chang Ju-peng, Yu Shen-cheng dan Yu Chih-shan yang dulunya merupakan pengikut setia Zhang Zuolin berseberangan sejak awal dengan Zhang Xue Liang

yang cenderung ingin mengintegrasikan wilayah Manchuria ke dalam Republik Cina Nasional (Hurley, 2012). Mereka telah didudukkan dalam jabatan militer baru Manchukuo di bawah pemerintah pendudukan Jepang dan ditugaskan untuk memburu para gerilyawan Cina Komunis yang berada di wilayah Manchuria dan kawasan Cina utara. Hal ini juga didasarkan dari program kebijakan Chiang Kai Shek yang waktu itu memprioritaskan memberangus pengaruh gerilya-wan Cina Komunis daripada ancaman militerisme Jepang yang saat itu telah menganeksasi Manchuria. Dan kebijakan itu merugikan Zhang Xue Liang, di mana banyak anak buah ayahnya termasuk mereka yang telah disebutkan di atas menyeberang ke kubu Jepang dengan dalih memerangi komunisme di Manchuria.

Pemerintahan kolaborasi (*Manchukuo*) dengan pemerintah pendudukan Jepang di Manchuria memang menuai banyak kelemahan dan juga sarat berbagai macam kepentingan khususnya pada elit elit lokal yang ada seperti mengamankan bisnis, mengamankan status sosial dan beberapa keuntungan yang lain. Sementara itu untuk kelas sosial yang lain khususnya mereka yang menentang pendudukan Jepang di Manchuria lebih menjalankan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung ke dalam bentuk kantong kantong perlawanan dan juga menjalin hubungan dengan Uni Soviet, para pemberontak Korea sampai tahun 1945 yang ditandai dengan runtuhnya pemerintahan Manchukuo dan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.

2. Kritik Pandangan Heping/Perdamaian Dalam Pemerintahan Kolaborasi Bentukan Wang Jing Wei

Peristiwa insiden di jembatan Marco Polo, Beijing yang diprovokasi oleh militerisme Jepang telah membuka babak baru konfrontasi dengan militer Cina yang dikenal dengan perang Sino-Jepang II dimulai dari bulan Juli 1937. Wang Jing Wei salah satu pemimpin Cina yang bersinergi dengan kekuatan kubu Chiang Kai Shek yang menyerukan kepada orang-orang Cina untuk melawan invasi Jepang. Hal ini sempat berkebalikan dengan kenyataan di lapangan setelah jatuhnya Nanjing ke tangan militer Jepang pada awal Desember 1937 telah merubah sikap Wang dan para pemimpin Cina yang lain di belakangnya, mulai menyadari bahwa Cina belum “siap” berkonfrontasi dengan Jepang. Kekalahan kekalahan yang diderita oleh militer Cina di awal perang Sino-Jepang telah menyebabkan para pemimpin Cina termasuk Wang Jingwei mulai mengambil sikap berdamai dengan Jepang dalam rangka untuk menyelamatkan negara serta mencegah penderitaan rakyat sipil dalam jangka panjang. Selain itu, Wang juga sempat memikirkan strategi bahwa dengan peperangan melawan invasi Jepang secara berkepanjangan akan menguntungkan kancah politik bagi kelompok Komunis untuk memperluas pengaruhnya untuk mempengaruhi rakyat sipil Cina.

Dilihat dari apa yang dikemukakan di atas terlihat bahwa terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi tentang berbagai alasan heping atau perdamaian yang dilakukan Wang, di mana hal yang terbesar yang patut diberikan catatan ialah rivalitas politik antara Wang dengan Chiang Kai Shek. Rivalitas politik selama ini selalu dimenangkan oleh Chiang Kai Shek mulai dari ekspedisi penyatuan Tiongkok sampai dengan konflik Sino-Jepang II dalam memperoleh simpati publik. Oleh sebab itu, Wang Jing Wei melihat terdapat celah yang cukup

baik untuk menggembosi pengaruh Chiang Kai Shek pasca jatuhnya Nanjing ke tangan pendudukan militerisme Jepang, di mana mulai menggiring opini publik bahwa Chiang gagal sebagai pemimpin Cina dan hanya menunggu waktu pemerintahan sementara yang dipimpinnya di Chungking jatuh (Lopes, 2018). Tidak hanya itu saja, Wang juga menganggap bahwa pemerintahan kolaborasinya dengan Jepang akan mengharapakan situasi baru untuk Cina sebagai bangsa modern yang sederajat dengan Jepang. Selain itu di dalam menarik simpati dari para pendukung Chiang yang tetap mempertahankan kebijakan anti komunis, Wang Jing Wei berdalih bahwa pemerintahan kolaborasi yang ada di Nanjing dapat mengikis pergerakan kelompok komunis sekaligus menasionalisasikan konsesi konsesi asing yang ada di Cina dan tidak kalah pentingnya ialah mengembalikan kedaulatan nasional dari pengaruh imperialisme Barat. Untuk mensahkan kedudukan pemerintahannya, Wang Jingwei dengan kubu pendukungnya dan juga pemerintah militer Jepang tetap mempertahankan pemerintahan nasionalis dan tetap menggunakan bendera kebangsaan yang sama. Sementara itu untuk kelanjutan kebijakannya, Wang terus memproyeksikan dirinya sebagai pengganti yang sah dari kepemimpinan Sun Yat Sen dan tetap menyatakan kebijakan yang didasarkan pada ajaran Sun Yat Sen yakni berpegang pada Sanmin Zhuyi/ Tiga Prinsip Rakyat dan Xianzheng/Konstitusi-onal. Dalam menerapkan kebijakannya, Wang juga berjanji pada parlemen untuk menghormati warisan Sun salah satunya Heping/ mewujudkan perdamaian serta menerapkan konstituante. Langkah kongret yang dicapai, program program tersebut telah juga diterapkan di daerah pedesaan di wilayah republik Cina- Nanjing. Wang Jingwei juga menyadari bahwa kebijakannya juga akan didukung oleh pemerintah

militer Jepang. Dia juga percaya bahwa pemerintah pendudukan Jepang mengakui pemerin-tahannya dan pemerintah pendudukan Jepang tidak punya pilihan lain selain mengambil kebutuhan kebutuhan sosial dan ekonomi. Selain itu dalam mendukung pemerintah pendudukan Jepang, Wang Jingwei dapat melihat kesempatan untuk memper-tahankan “demokrasi” prioritas politik tertinggi yang dia pertahankan karena Wang mengikuti Sun Yat Sen dalam membentuk sebuah perjuangan yang modern dan demokratis (Taylor, 2019)

Apa yang dilakukan oleh Wang di dalam menciptakan tatanan tersebut selalu dibumbui dengan beberapa bentuk propaganda. Propaganda yang dimaksud salah satunya mengikatkan diri pada tradisi Konfusianisme, dimana sasarannya ialah berbakti kepada negara serta menyisipkan beberapa pesan kepada publik rakyat Cina bahwa Wang bersedia mengambil risiko dalam peneguhan reputasinya untuk kepentingan negaranya. Wang Jingwei juga tidak pernah berpikir bahwa keputusan kolaborasinya dengan pemerintah pendudukan Jepang akan membuat Cina kehilangan sebagai bangsa yang merdeka. Dia juga tidak percaya terhadap pemerintah pendudukan Jepang yang memiliki rencana untuk mengubah Cina menjadi sebuah koloni. Sementara itu jika dilihat dari pendefisiannya sebagai sebuah bangsa yang didasarkan bahasa, wilayah, adat istiadat, agama, sifat fisik dan sejarah telah juga kemungkinan dilihat oleh Wang mengenai isu invasi Jepang. Secara konsepsi dalam pemikiran Wang Jing Wei berusaha mendekatkan diri pada tema asimilasi untuk menguatkan dalil pembenarannya dalam skema besar yakni:

1. kekuatan ras yang sama yang bergabung untuk membentuk sebuah negara baru.

2. perlombaan kaum mayoritas dalam menyerap kaum minoritas yang ditaklukkannya
3. ras minoritas menaklukan asimilasi ras mayoritas
4. minoritas yang menaklukan telah berasimilasi dengan mayoritas yang ditaklukkannya.

Jika dilihat dari keempat skema tersebut, Wang ingin menandakan bahwa dengan mengacu skema tersebut, pemerintahan kolaborasi yang didirikannya bersama pemerintah pendudukan Jepang mempunyai kemiripan dengan pendudukan Mongol di era Yuan dan juga pendudukan Manchu di era Qing. Dengan berbagai dalil, Wang menegaskan bahwa Cina yang didominasi oleh suku Han memang telah berhasil mengasimilasi suku suku minoritas termasuk Manchu dan Mongol, demikian juga ketika Jepang masuk menduduki Cina mempunyai kemiripan dengan konsep asimilasi tersebut. Wang sendiri juga mempunyai pandangan klasik mengenai alasan mengapa dirinya mengadakan perdamaian dengan pihak Jepang dan berusaha menggalang kekuatan politik dengan pemerintahan pendudukan Jepang. Wang juga paham bahwa sejarah peradaban Cina, di mana Cina dalam kurun waktu lima ribu tahun yang lalu telah berulang kali mengalami “invasi” dari bangsa bangsa di sekitarnya dan dalam pandangan Cina dikatakan “barbar”. Maka daripada itu, Wang juga mengungkapkan pemaparannya, memang tidak semuanya “invasi” dari bangsa asing membawa dampak negatif bagi kelangsungan Cina, namun ada juga dampak positif yang ditinggalkan bagi peradaban Cina.

Peradaban Cina dalam pandangan Wang (Ei, 2012) merupakan “produk sejarah dari interaksi masyarakat yang berbeda beda”. Contohnya, Cina di bawah pendudukan Manchu dapat dikatakan periode

yang paling maju dengan prestasi absolutisme politik canggih dalam sejarah Cina. Melalui Sinocization yang sistematis, para kaisar Manchu dapat memenangkan dukungan setia dari masyarakat Cina Han dan hasilnya dapat diketahui di masa itu, lebih dari satu abad yang penuh kedamaian, kemakmuran dan juga pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

Lewat pemerintahan kolaborasi yang didirikan oleh Wang Jing Wei (Hurley, 2012) memberikan pesan dan kesan bahwa dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah pendudukan Jepang akan menciptakan persatuan spiritual Asia di bawah Jepang dan dia sendiri membenarkan garis pandangannya dengan mengikuti pemikiran Sun Yat Sen tentang Pan-Asianism. Dengan pandangan tersebut, juga pernah dilakukan oleh Sun Yat Sen untuk meminta Cina dalam mengikuti Jepang untuk upaya bersama melestarikan “kemurnian budaya Asia” dari cengkeraman imperialisme Barat. Wang Jing wei juga menyadari bahwa kebijakan pendahulunya yakni Sun Yat Sen telah “bersedia untuk tawar menawar dengan kekuatan asing” supaya menyetujui dalam membantu ambisi politiknya (Takeda, 2014), salah satunya yang paling penting ialah secara logika dengan membentuk pemerintahan kolaborasi dengan pemerintah pendudukan Jepang di Cina secara tidak langsung kedaulatan bisa dibilang tidak ada mengingat pemerintah pendudukan Jepang di Cina bisa sewaktu waktu mengambil alih pemerintahan kolaborasi apalagi untuk bidang ekonomi dan politik tidak mempunyai ruang kebebasan kebijakan yang akan diambil dan harus lewat persetujuan pemerintah pendudukan Jepang di Cina. Jadi bagaimanapun juga

pemerintah kolaborasi yang didirikan oleh Wang Jing Wei masih tergolong lemah seperti halnya pemerintah Perancis Vichy yang pro terhadap Jerman Nazi.

Sejalan dengan pemaparan Bunker (1972), yang melihat dari data yang didapatkan, kemakmuran ekonomi secara bertahap mulai bermunculan di daerah pendudukan Jepang yang tergolong juga daerah pemerintahan kolaborator . Dalam dunia perdagangan juga diperluas tidak hanya di bawah daerah basis pemerintah kolaborator namun juga di daerah pendudukan Jepang yang lainnya di wilayah Cina. Untuk sektor perdagangan dengan luar negeri juga meningkat dan salah satu faktor penyebabnya meningkatnya ekonomi yang diorganisasikan oleh pemerintah kolaborator (Lin, 2018)

Pemerintah kolaborator menunjukkan perkembangan ekonomi yang dinilai cukup pesat di masanya yang tergolong cepat pulih serta diperluas tidak hanya di delta sunyai Yangtze yang tergolong jantung negeri pemerintahan Wang. Wilayah lainnya yakni di wilayah Suzhou, ibukota propinsi Jiangsu sangat terasa karena banyak dari para penduduknya yang meninggalkan wilayah tersebut di masa awal perang dan hal itu cepat (Zanasi, 2008)

Interpretasi yang dikemukakan oleh Bunker yang dikutip oleh (Xia, 2010), (Zanasi, 2008), (Hurley, 2012) memiliki ragam kelemahan, di mana dia mengesampingkan faktor faktor lain seperti yang dikaji hanya wilayah wilayah besar seperti jantung pemerintahan Wang di delta sungai Yangtze dan itupun tidak semuanya wilayah mengingat pemerintahan Wang kurang disukai oleh masyarakat Cina. Hal ini bisa diketahui dari pergerakan anti

pemerintahan Wang secara gerilya di jantung pemerintahan yang kerap kali mengancam stabilitas keamanan pemerintahan tersebut. Tidak hanya itu saja, konteks perkembangan ekonomi di jantung pemerintahan kolaborasi yang didirikan oleh Wang Jing Wei merupakan salah satu strategi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk menarik masyarakat Cina yang ada di basis daerah yang berada di dalam naungan Chiang Kai Shek, di mana untuk saat saat itu tengah terjepit baik secara politis dan juga ekonomi. Oleh sebab itu, di dalam dokumen yang dikemukakan oleh Bunker, banyak dari kalangan pengusaha dan juga militer yang dulunya setia kepada rezim Chiang Kai Shek mulai berpaling ke Nanjing ke pusat jantung pemerintahan kolaborasi yang didirikan oleh Wang Jing Wei hanya untuk mencari keuntungan ekonomi semata. Hal ini sampai dengan peristiwa Pearl Harbour hingga awal tahun 1945, di mana untuk periode tahun tersebut merupakan periode yang cukup berat bagi pemerintahan rezim Wang. Walaupun tidak disampaikan di dalam beberapa analisis dari beberapa riset yang ada tentang pemerintahan kolaborasi namun perlu untuk menjadi catatan bahwa selama kurun 1942-1945, pemerintah pendudukan Jepang di berbagai daerah baik di Cina sampai dengan di Asia Tenggara selalu mengeksploitasi kekayaan alam di wilayah pendudukannya. Oleh sebab itu, hal ini juga menjadi perhatian tersendiri mengingat pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar jantung pemerintahan Wang tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun telah banyak menarik minat dari para pengusaha, militer dan masyarakat sipil lainnya dari kubu Chiang Kai Shek untuk menyeberang. Nyatanya dari periode 1942-1945, gerakan bawah tanah anti pemerintahan Wang yang dibangun di

wilayah basis republik of China-Nanjing terus menguat dan sering kali menteror jalannya pemerintahan kolaborasi tersebut.

3. Tanggapan Negara Negara Barat Dan Respon Wang Jing Wei

Hubungan Cina dengan negara negara Barat memang sudah lama terjalin sejak masa era Ming dengan diawali Portugis yang menguasai Macau. Mulai dengan datangnya Portugal yang berkuasa di Macau yang disusul Belanda menambah deretan panjang telah menerangkan secara tidak langsung bahwa daratan Cina menjadi sasaran empuk kolonisasi Barat. Hal ini terus menguat sampai dengan perang candu, di mana Cina kalah dalam konflik terbuka melawan Inggris dan terpaksa menandatangani perjanjian damai dengan Inggris. Beberapa butir perjanjian damai tersebut, salah satunya yang terpenting ialah menyerahkan Hong Kong kepada Inggris dan juga Inggris berhak mendirikan konsesi konsesi dagangnya di seluruh pantai Cina. Hal ini disusul oleh negara negara lain seperti Perancis, Jerman, Rusia, Italia dan juga Jepang yang memaksa Cina untuk mendirikan beberapa konsesi negara negara tersebut dengan berbagai keistimewaan yang ada. Hingga sampai akhir penghujung era Qing dan awal mula Republik Of China, kedudukan negara negara Barat tersebut semakin kuat terlebih dalam mengendalikan ekonomi dan bisnis untuk kepentingan negara tersebut secara masing masing.

Hal ini ditunjang pula dengan perkembangan industri yang cukup pesat di saat itu, di mana banyak negara negara Barat sebagian besar lebih senang jika melihat Cina berada di bawah kekuasaan panglima panglima lokal atau warlord dengan beberapa pertimbangan faktor tertentu yang tidak lain rata rata

pertimbangan faktor ekonomi dan bisnis. Secara garis besar, konsep ekonomi dan bisnis dari berbagai negara negara Barat yang mempunyai wilayah konsesi di daratan Cina cukup kuat dan memiliki hubungan yang cukup unik dengan para penguasa lokal hingga pemerintah nasional di sekitar lingkaran kekuasaan Chiang Kai Shek sampai menjelang konflik Sino- Jepang II.

Bangsa bangsa Barat yang mempunyai konsesi di wilayah Daratan Cina baik Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Italia dan juga Jerman seakan akan bersepakat khususnya dalam konflik Sino-Jepang II, di mana yang terlihat cukup jelas di sini ialah Jerman. Pihak Jerman di bawah Hitler sebetulnya telah menjalin kerja sama yang cukup erat dengan pemerintahan Chiang Kai Shek, terlebih untuk urusan industri dan juga militer. Hal ini bisa dilihat dari beberapa penasehat militer di pemerintahan Chiang Kai Shek ialah mayoritas orang Jerman dan juga uniform militer Cina saat itu juga mirip dengan uniform militer Jerman. Bisa dikatakan juga pemerintahan Chiang Kai Shek memiliki rencana jauh terkait dengan pembangunan industri militer dengan pemerintahan Hitler Jerman. Situasi ini berubah setelah pecah konflik Sino-Jepang II yang diawali dengan peristiwa konflik di wilayah jembatan MarcoPolo Beiping/Beijing yang berlanjut dengan agresi militer Jepang di wilayah Shanghai. Di dalam pandangan negara negara Barat lainnya khususnya di dalam memandang Jepang, di mana Jepang merupakan negara yang cepat mengadopsi modernisasi dan kedudukan Jepang sendiri saat itu sederajat dengan negara negara Barat. Dapat dikatakan pula bahwa “invasi” Jepang ke Cina sama dengan kepentingan negara negara Barat untuk

memperoleh konsesi yang lebih luas lagi dari otoritas Cina.

Di saat Wang Jingwei dan pengikutnya memutuskan untuk membentuk pemerintahan yang berkolaborasi dengan pemerintah pendudukan Jepang, mereka juga mempunyai pandangan seperti dipaparkan di depan bahwa Cina nampaknya akan kalah berperang dengan Jepang dan didukung dengan situasi Internasional yang kurang menguntungkan bagi Cina.

Beberapa negara negara Barat termasuk juga Amerika Serikat mengeluarkan kecaman kecaman kepada pemerintah Jepang terhadap Insiden Manchuria, sambil menawarkan bantuan materi kepada Cina untuk berjuang melawan invasi Jepang (Taylor, 2019). Sementara itu, pemerintah Jepang juga berhasil meyakinkan kepercayaan negara negara Barat bahwa pendudukan Manchuria oleh Jepang adalah legal, seperti Amerika Serikat “memiliki” Panama. Hal ini juga dibenarkan oleh John V.A. MacMurray selaku kepala departemen Negara Urusan Timur Jauh khususnya di Cina telah melaporkan ke Washington bahwa Jepang tetap mematuhi perjanjian khususnya perjanjian di Washington. Diplomat Amerika tersebut juga mempercayai bahwa dampak dari insiden Manchuria merupakan masalah internal antara Jepang dengan Cina mengenai teritorial. Kebijakan “melunak” dari negara negara Barat kepada Jepang terus berlanjut bahkan sampai dengan pecahnya perang Sino-Jepang di tahun 1937. Negara negara Barat saat itu menentukan sikap untuk berkolaborasi dengan Jepang sampai dengan menjelang peristiwa Pearl Harbour. Secara tidak langsung dapat dipahami bahwa Jepang telah mampu melengkapi mesin mesin perangnya dengan bahan bahan mentah yang didapat dari negara negara Barat termasuk juga Amerika

Serikat. Semenjak pecah perang Sino- Jepang, dapat dikatakan pula secara tidak langsung negara negara Barat telah bekerja sama dengan militer Jepang dalam menekan para pejuang Cina dan secara abstrak dapat dikatakan juga ikut andil dalam membantu mengkonsolidasikan pendudukan Jepang terhadap Cina, antara lain di wilayah Shanghai dan Chungking (Wakeman Jr., Frederic, 2000)

Selama kurun waktu 1937-1941, secara tidak langsung, terjadi dualisme pandangan dari negara negara Barat yang memiliki wilayah konsesi di China baik itu Inggris, Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Italia mengingat di waktu itu Jerman dan Italia sudah membentuk pakta aliansi sendiri dengan pihak Jepang yang diwujudkan dalam lobi lobi diplomatik di antara ketiga negara dan akhirnya Jerman Nazi tidak mencampuri urusan konflik Sino- Jepang II walaupun secara material dan support latihan militer China saat itu ditangani oleh pihak Jerman. Demikian juga dengan Perancis yang awalnya berada di poros berseberangan dengan pihak Jerman dan Italia akhirnya setelah negeri Perancis diduduki oleh Jerman Nazi di tahun 1940 berdampak pada koloni koloni mereka di luar Perancis, di mana membiarkan sekutu sekutu Jerman seperti halnya Jepang leluasa memasuki wilayah mereka seperti halnya di China. Di pihak lain yakni Inggris di saat itu masih berjuang sendirian di dalam kancah perang Eropa melawan Jerman Nazi dan Italia dan juga berdampak di semua kawasan koloni Inggris dan kawasan sekitarnya. Hal ini bisa dilihat dari setelah jatuhnya Nanjing di bulan Desember 1937 oleh militer Jepang yang berakibat ibukota pemerintahan China dipindahkan ke wilayah pedalaman di kawasan Barat selatan yakni di wilayah Chungking. Pihak Inggris sendiri di saat itu tidak bisa berbuat banyak dan menghindari konflik langsung dengan negara negara sekutu Jerman dan Italia di

Asia, di mana salah satunya ialah menutup akses perhubungan antara Burma (Myanmar) dengan China dan secara tidak langsung pula menutup jalan komunikasi/diplomasi dengan pemerintahan Chiang Kai Shek di Chungking.

Jika memandang kebijakan Amerika Serikat saat itu, tidak bisa dilepaskan dari situasi global yang tidak lain ialah krisis ekonomi global. Selain itu juga sudah dijelaskan tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang bersifat dualisme antara netral dengan memberikan bantuan kepada negara negara yang berseberangan dengan Jerman, Italia dan Jepang. Di sisi lain, untuk Amerika Serikat di saat itu masih mengedepankan diplomasi sambil menekan halus kepada Jepang untuk mengakhiri konflik terbuka di daratan China, namun di sisi lain, Amerika Serikat mencari kontak hubungan dengan pemerintahan Chiang Kai Shek di Chungking. Amerika Serikat sendiri semula memandang pemerintahan rezim Wang Jing Wei merupakan sebuah ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat di daratan China, di mana di tengah membangun hubungan diplomasi dengan Jepang yang diliputi pasang surut semenjak insiden Nanjing.

Setelah pemerintahan kolaborator di bawah Wang Jing Wei terbentuk kurang lebih berjalan tiga bulan, beberapa langkah yang ditempuh pemerintahan kolaborator berusaha untuk menghimbau kepada negara negara Barat untuk mengakui pemerintahan tersebut. Dengan melihat konteks tersebut, Drama “tarik ulur diplomasi” lebih dicondongkan pemerintah pendudukan Jepang dengan koalisinya pemerintahan kolaborator Cina kepada negara negara Barat yang mempunyai konsesi di Cina. Hubungan “harmonis” di tengah berkecamuknya konflik internal Sino-Jepang,

banyak membuat negara negara Barat lebih memilih kepentingan bisnisnya di Cina dan dapat dikatakan “membantu secara tidak langsung” konsolidasi pemerintahan kolaborasi.

Inggris menutup jalan Burma yang menuju ke daratan China karena jalan tersebut menghubungkan Burma dengan pemerintahan Chiang Kai Shek di Chungking dan merupakan jalan satu satunya akses jalur pemerintahan di Chungking yang menghubungkan dengan dunia luar di saat itu baik dalam memperoleh pasokan senjata, makanan dan barang barang lainnya yang masuk dari Burma untuk menyuplai kebutuhan pemerin-tahan Chiang Kai Shek di Chungking. Efek penutupan ini memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi kedua belah pihak baik pemerintahan Chiang Kai Shek di Chungking dan juga pemerintah pendudukan Jepang dan kolaborasinya termasuk Wang Jing Wei. Bagi pemerintahan Chiang Kai Shek, mau tidak mau, mereka berjuang sendirian menghadapi Jepang dan kolaboratornya hampir kurang lebih 2 tahun sebelum peristiwa Pearl Harbour. Bagi pemerintahan kolaborator di bawah Wang Jing Wei, penutupan jalur tersebut memberikan efek ganda, di mana pemerintahan kolaborator mendapatkan tempat di kalangan negara negara Barat yang sikapnya masih oportunis dan juga mampu membenahi perekonomian China yang sempat hancur di era awal konflik Sino- Jepang II.

Selain itu juga bisa dipahami bahwa secara tidak langsung nilai Jepang di mata negara negara Barat ikut naik dan hasilnya hak dan kepentingan Jepang di Cina dihormati oleh negara negara Barat sampai dengan meletusnya peristiwa Pearl Harbour. Dampak dari awal perang Sino- Jepang sudah jelas bahwa, hubungan tidak langsung antara Jepang

dengan negara negara Barat dapat dikatakan ikut membantu memperkuat pertahanan kolaborasi pemerintahan Cina Nanjing yang juga ikut mewujudkan perdamaian dengan pemerintah pendudukan Jepang.

KESIMPULAN

Heping atau perdamaian merupakan salah satu ajaran dr Sun Yat Sen, *San Min Chu I*, di dalam memodernisasi *Republic of China*. Namun, ketika hal tersebut disalahgunakan untuk kepentingan politis, esensi dari *heping* sendiri akan hilang, seperti yang dipahami oleh Wang Jing Wei sebagai batu loncatan menuju negara komunis. Sejalan dengan itu, Wang Jing Wei melihat revolusi nasional sebagai batu loncatan menuju revolusi komunis. *Heping* yang ditawarkan oleh Wang Jing Wei sangat bernuansa politis mengingat rivalitas antara Chiang Kai Shek dengan Wang Ji Wei selalu dimenangkan oleh Chiang Kai Shek. *Heping* digunakan sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Cina yang berjuang bersama pemerintah pendudukan Jepang. Sejalan dengan itu, dia menggambarkan pemerintah kolaborasi *Republic of China-Nanjing* dengan pendudukan Jepang sama halnya dengan bangsa Manchu dan Mongol di saat memerintah daratan Cina yang juga mendudukkan bangsa Han di pemerintahan dalam mencapai kemakmuran bersama.

REFERENSI

- Darini, R. (2010). Garis Besar Sejarah China Era Mao. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–75.
- Ei, M. (2012). “ *Traitors* ” and the *Qing Government Policies Directed at the Coastal Residents of Fujian and Guangdong at the Time of the Opium War*.
- Hurley, S. J. (2012). *W & M ScholarWorks Shame of a Nation : The Evolution of Hanjian since the Late Qing*.
- Kelly Anne Hammond, M. A. (2015). *The Conundrum of Collaboration: Japanese Involvement with Muslims in North China, 1931-1945*.
- Kusmayadi, Y. (2018). Sejarah Runtuhnya Dinasti Manstu Awal Abad Ke-20. *History and Education, Vol. 5 No. 2 September 2018*, 15 (40), 6–13. http://awsassets.wwfnz.panda.org/downloads/earth_summit_2012_v3.pdf%0Ahttp://hdl.handle.net/10239/131%0A
- Lin, C. (2018). Yiguandao under the Shadow of Nationalism. *Religion and Nationalism in Chinese Societies*, 233–252. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1zjkzkd.12>
- Lopes, H. F. S. (2018). War, State-Building, and International Connections in Nationalist China. *Journal of the Royal Asiatic Society*. <https://doi.org/10.1017/S1356186318000469>
- Pulungsari, R. (2018). Menglongshi 朦胧诗 dan Revolusi Kebudayaan Cina. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 8(1), 84. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v8i1.188>
- Rochmat, S. (2019). *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Saryani. (2008). Menelusuri Semangat Nasionalisme Di Tiongkok. In *Jurnal Ketahanan Nasional: Vol. XIII* (Issue 1, pp. 122–157). <https://doi.org/10.25077/fetrian.1.1.122-157.2019>
- Takeda, K. (2014). *The interpreter as traitor: Multilingualism in Guizi lai le (Devils on the Doorstep)*. *Linguistica Antverpiensia, New Series. Themes in Translation Studies*, 13, 93–111. 93–111.
- Taylor, J. E. (2019). From Traitor to Martyr: Drawing Lessons from the Death and Burial of Wang Jing Wei, 1944. *Journal of Chinese History*, 3(1), 137–158. <https://doi.org/10.1017/jch.2017.43>
- Wijaya, D. A., sumandi, & Sumarjono. (2015). Konflik Perebutan Kekuasaan Antara Kaum Nasionalis Dan Komunis. *UNEJ JURNAL PENDIDIKAN 2015, I* (October), 1–13.
- Xia, Y. (2010). Traitors to Chinese Race (*Hanjian*): Political and Cultural Campaigns against Collaborators during the Sino-Japanese War of 1937-1945. In *Presented to the Department of History and the Graduate School of the University of Oregon in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy* (Issue September).

Zanasi, M. (2008). Globalizing hanjian: The suzhou trials and the post-world war II discourse on collaboration. *American Historical Review*, 113(3), 731–751. <https://doi.org/10.1086/ahr.113.3.731>